



2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025 – 2029 dapat tersusun. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Wadaslintang.

Renstra ini disusun dengan mengacu RPJMD dan Visi Misi Kabupaten Wonosobo. Dokumen ini memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami berharap dapat memberikan arahan yang jelas untuk pencapaian kinerja yang optimal dan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam mewujudkan Kecamatan Wadaslintang yang lebih maju dan sejahtera. Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam dokumen ini, dan kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

BAB I PENDAHULUAN

3.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Wonosobo. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Rencana Strategis Kecamatan Wadaslintang 2025 - 2029 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Wadaslintang sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025 - 2029. Dengan demikian, RPJMD 2025 - 2029 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, Masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025 – 2029 sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Wadaslintang, serta menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yaitu kemana Kecamatan Wadaslintang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik.

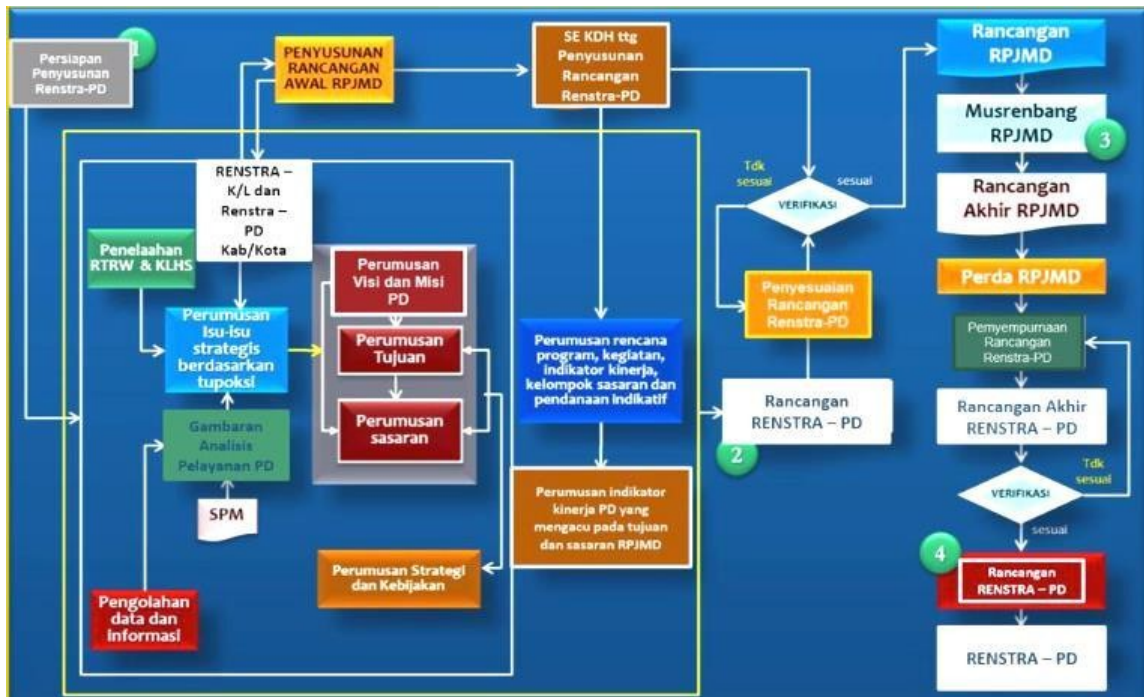
Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wadaslintang.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Wadaslintang bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah instrumen strategis yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui implementasi Renstra ini, pemerintah kecamatan berkomitmen untuk menjadi pelayan masyarakat yang andal, fasilitator pembangunan yang efektif dan penggerak kemajuan di wilayahnya.

Gambar1.1.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Wadaslintang



3.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 8 Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
9. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029.
10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

3.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud agar dijadikan sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran Pemerintah Kecamatan Wadaslintang dalam penyelenggaraan Pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, selain itu Renstra disusun dengan maksud sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Wadaslintang agar lebih terarah sehingga sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat tercapai.
2. Tujuan Penyusunan Renstra
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.
 - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tiga tahunan.
 - d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Wadaslintang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

3.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan
- 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur
- 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan
- 2.5 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
- 2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan
- 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN ,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Visi dan Misi RPJMD
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.4 Arah Kebijakan Tahunan

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program

4.2 ProgramKegiatan Prioritas

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

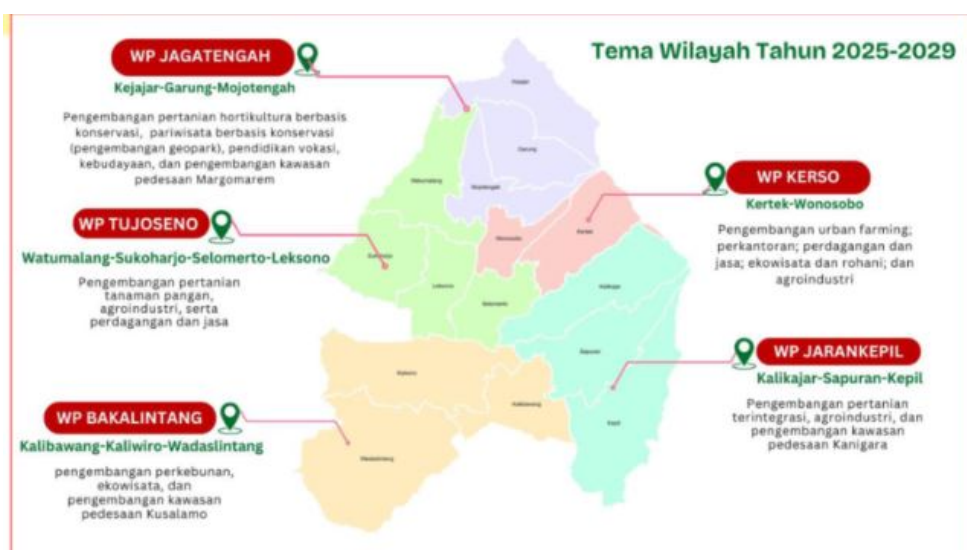
Kecamatan Wadaslintang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan. Secara geografis memiliki luas wilayah 12.716km² atau 12.93% dari luas Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan dengan ketinggian wilayah antara 268m diatas permukaan laut.

Kecamatan Wadaslintang merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, berjarak 37 km dari ibukota Kabupaten Wonosobo, waktu tempuh 90 menit, dan 142 km dari ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang).

Secara administrasi Kecamatan Wadaslintang berbatasan dengan:

Sebelāh utara	: Kecamatan Kaliwiro
Sebelāh timur	: Kabupaten Purworejo
Sebelāh Selatan	: Kabupaten Purworejo
Sebelāh barat	: Kabupaten Kebumen

Gambar 2.1
Tema Rencana Tata Ruang dan Wilayah

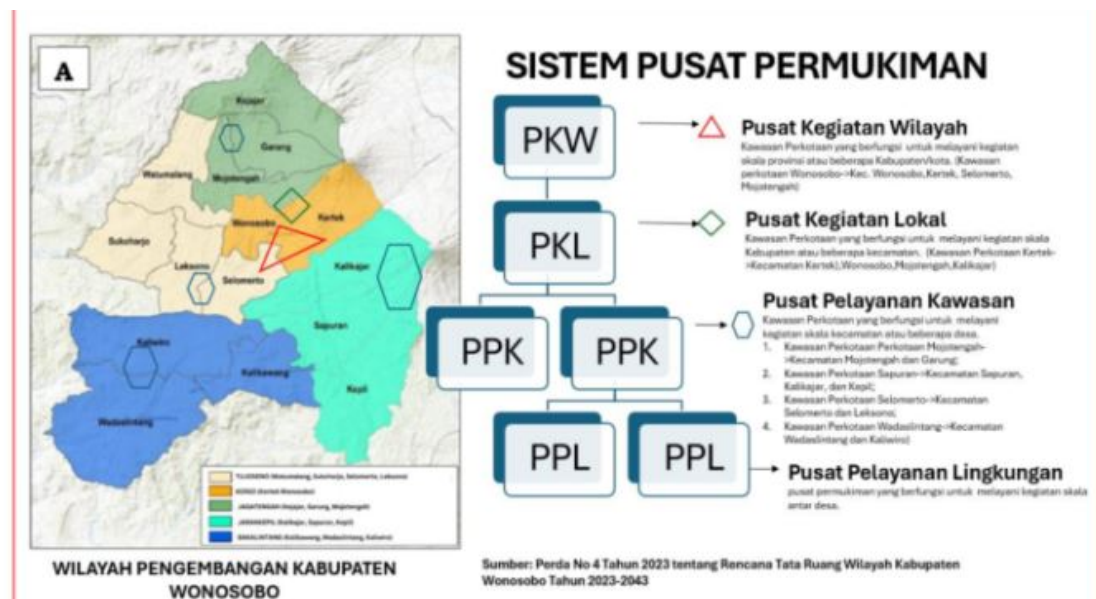


Sumber : RPJMD Kab. Wonosobo

Berdasarkan konteks Wilayah Pengembangan, Kecamatan Wadaslintang masuk dalam kelompok BAKALINTANG (Kalibawang-Kaliwiro-Wadaslintang) yang difokuskan pada pengembangan perkebunan, ekowisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

Gambar 2.2

Sistem Pusat Permukiman Pada Struktur Ruang RTRW



Sumber : RPJMD Kab. Wonosobo

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Kecamatan Wadaslintang masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan, dengan wilayah perkotaan di Kecamatan Wadaslintang dan Pusat Pelayanan Lingkungan di Desa Lancar.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Wadaslintang adalah sebanyak 65.354 jiwa yang terdiri dari 32.988 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 32.366 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Persebaran penduduk di Kecamatan Wadaslintang belum merata. Hal ini terlihat dari tingkat Jumlah penduduknya. Jumlah penduduk tertinggi di Desa Ngalian sejumlah 6.939 jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk terendah di Desa Sumbersari sebesar 729 jiwa.

Kemiskinan di Kecamatan Wadaslintang saat ini menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani. Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Berbagai upaya dan kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat terendah desa/ kelurahan melalui perencanaan Musrenbang.

Dari aspek kesehatan, Kecamatan Wadaslintang termasuk kategori baik, ini berdasarkan data laporan gizi EPPGBM Puskesmas Wadaslintang tahun 2025, kecamatan Wadaslintang tidak masuk dalam daftar 6 kecamatan lokus stunting. Namun demikian masih ditemukan beberapa kasus stunting yaitu 193 anak (13,40%), Gizi kurang 44 anak, dan Gizi Buruk 8 anak. Untuk mengurangi dan menanggulangi kasus stunting dilakukan upaya optimalisasi program kegiatan posyandu di Kecamatan Wadaslintang yang berjumlah 70 pos posyandu dengan 340 kader posyandu di 2 Puskesmas. Untuk mengurangi angka stunting, Kecamatan Wadaslintang melakukan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang diluncurkan oleh BKKBN.

Tabel 2.1

Data Capaian GENTING Kecamatan Wadaslintang tahun 2025

NO	WILAYAH	JUMLH RT/TARGET	JUMLAH GENTING	CAPAIAN (%)
1	KECAMATAN	2	3	150
2	WADASLINTANG	41	2	4,88
3	KALIGOWONG	34	10	29,41
4	SUMBERSARI	5	5	100
5	SUMBEREJO	17	2	11,76
6	EROREJO	14	1	7,14
7	KARANGANYAR	26	3	11,54
8	PANERUSAN	18	5	27,78
9	PLUNJARAN	21	1	4,76
10	KUMEJING	18	1	5,56
11	LANCAR	50	10	20
12	SOMOGEDE	32	2	6,25
13	TRIMULYO	36	1	2,78
14	TIRIP	35	35	100
15	BESUKI	23	23	100
16	GUMELAR	27	27	100

17	NGALIAN	50	3	6
18	KALIDADAP	17	17	100
	TOTAL	466	151	32,40

Sumber : Kecamatan Wadaslintang

Pendidikan di Wilayah Kecamatan Wadaslintang Kesadaran masyarakat tentang pendidikan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya sarana dan jumlah murid di tingkat pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan lanjutan.

Tabel 2.2
Jumlah Gedung Sekolah di Kecamatan Wadaslintang

Jumlah Sekolah	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PAUD/TK	43	43	43	43	43
SD/ MI	51	51	51	51	51
SMP/ MTS	16	16	16	16	16
SMA/ MA/SMK	6	6	6	6	6

Sumber : Kecamatan Wadaslintang

Meskipun tingkat pendidikan mengalami peningkatan, namun berdasarkan data data dari Pusdatin Kemendikbud masih ada ATS (Anak Tidak Sekolah) sebanyak 887 anak dengan rincian 202 BPB (Belum Pernah Bersekolah) 225 DO (Drop Out) dan 460 LTM (Lulus Tidak Melanjutkan).

Tabel 2.3
Data Kemiskinan, Stunting dan ATS Kecamatan Wadaslintang

	Kemiskinan	Stunting	ATS
2020	N/A	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A
2022	6517	239	270
2023	9143	312	93
2024	9485	349	740

Upaya untuk meningkatkan semangat dan motivasi bagi siswa untuk melanjutkan sekolah dan mengurangi ATS dilakukan dengan program sebagai berikut:

1. Kegiatan kunjungan Forkompinca ke sekolah-sekolah, pertemuan dengan Muspika, Guru dan Orang tua murid agar orang tua termotivasi untuk menyekolahkan anaknya minimal 12 tahun
2. Program Pendewasaan Usia Perkawinan/ PUP, dengan batas minimal usia perkawinan wanita 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Untuk mendongkrak angka melanjutkan sekolah.
3. Mendorong desa agar mengalokasikan APBDes untuk beasiswa berprestasi dan beasiswa miskin,serta fasilitas guru guru PAUD/TK milik desa.
4. Sosialisasi oleh Forkompinca ke sekolah baik SD, MI maupun SLTP untuk kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas anak didik. Selain pemberian motivasi, juga disampaikan tentang bahaya narkoba, minuman keras, dan juga kenakalan remaja lainnya dengan harapan mereka tidak melakukan hal negatif, serta lebih banyak mencari ilmu yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik.

Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan wilayah tersebut. Kondisi ekonomi menjadi modal bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maju dan tidaknya kondisi ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan barang dan jasa dan pertumbuhan kesempatan kerja, yang berarti pertumbuhan pendapatan penduduk.

Untuk Sumbangan persektor pada tahun 2024, sektor pertanian menyumbang cukup besar bagi Kecamatan Wadaslintang. Sumbangan terbesar PDRB sektor pertanian ini sangat realistis mengingat Kecamatan Wadaslintang merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan cukup sehingga sangat cocok untuk pertanian. Potensi pertanian di Kecamatan Wadaslintang cukup beragam, namun komoditas utama yaitu padi, jagung,

dan ubi. Serta komoditas hortikultura yaitu cabai, durian dan pisang. Hasil tanaman biofarmaka juga cukup banyak, yaitu jahe 470,4 ton dan kapulaga 712,46 ton. Kecamatan Wadaslintang juga berpotensi untuk pengembangan perikanan dan peternakan ayam potong.

Gambaran potensi di sektor pertanian tersebut diatas perlu terus dikembangkan karena mampu menyumbang PDRB terbesar di Kecamatan Wadaslintang sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kecamatan Wadaslintang. Berbagai upaya yang sudah dan perlu terus dikembangkan diantaranya:

1. Penataan lahan sesuai dengan peruntukan dan potensinya
2. Kerjasama dengan Pihak Perhutani untuk ekstensifikasi produk unggulan
3. Optimalisasi Industri kecil dan UMKM

Di kecamatan Wadaslintang ada 563 Industri kecil dan 1.924 UMKM. Apabila pengelolannya dapat dioptimalkan tentunya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Kecamatan Wadaslintang

4. Penggalan pendapatan desa melalui BUMDES

Selama ini pemerintah desa mengandalkan sepenuhnya pemenuhan alokasi anggaran yang diperoleh dari pemerintah kabupaten, Provinsi dan Pusat. Melalui BUMDES, ditargetkan desa mendapatkan pendapatan asli sendiri dari pengelolaan sumber daya lokal yang ada di desanya sendiri. Dengan demikian setiap Desa harus memiliki BUMDES.

5. Mengaktifkan kembali koperasi

Di Kecamatan Wadaslintang terdapat 26 Koperasi, namun saat ini hanya tinggal 6 koperasi yang masih aktif

6. Pengembangan Pasar Wadaslintang

Keberadaan pasar sangat mendukung aktifitas ekonomi serta pergerakan uang yang nantinya diharapkan dapat menggiatkan laju perekonomian.

Di Kecamatan Wadaslintang terdapat Bendungan Wadaslintang yang saat ini digunakan untuk irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan juga keindahan panoramanya dikembangkan sebagai obyek wisata.

Selain Waduk Wadaslintang, terdapat juga 4 Desa Wisata yaitu Eorejo (Lubang Sewu) Kumejing (Pesona Kumejing) Besuki (Air Terjun) dan Summersari (Tanjung serut). Di Kecamatan Wadaslintang juga terdapat beberapa objek wisata yang dikembangkan oleh masyarakat bersama dengan pemerintahan setempat, antara lain pemandian air panas di Somogede, Bukit Siloreng Indah, Sibedug, Dermaga Tritis, Sikrikil dan beberapa spot pemancingan. Objek dan tempat wisata ini diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menarik wisatawan yang nantinya bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wadaslintang

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

i) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- (1) Camat;
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
 - (a) Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan;
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
- (5) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- (6) Kepala Seksi Ketenteraman ,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8) Kelurahan.

ii) Tugas dan Fungsi Kecamatan:

1. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum,

pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- 3) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- 4) penyelenggaraan pelayanan umum;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Camat

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan,dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tatausaha, umum dan kerumah tanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan

Kecamatan;

- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - 6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
4. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Subag Paten sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.
5. Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemerintahan sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan dibidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan Lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

8. Seksi Ketenteraman, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (nonyustisial) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

9. Kelurahan

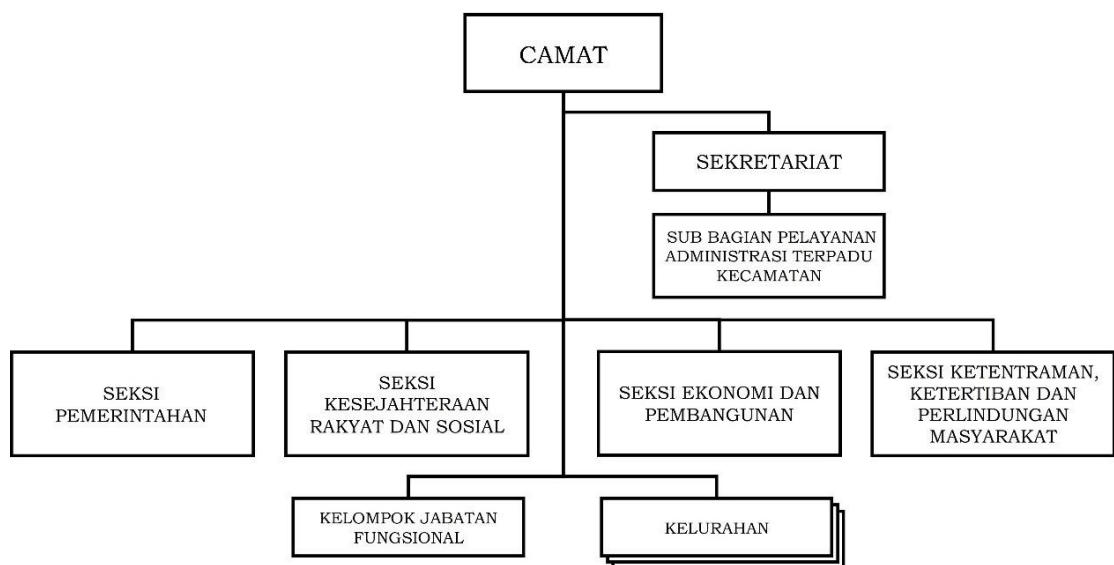
Tugas dan fungsi kelurahan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti PP 72 Tahun 2005),

adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Secara rinci, tugas kelurahan meliputi: pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

2.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur pegawai sesuai dengan Perbup Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Wadaslintang



Sumber : Perbup Wonosobo No 56 Tahun 2016

2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya merupakan potensi yang dimiliki sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Memiliki Sumber Daya Manusia yang terdiri ASN, PPPK dan Non-ASN.

Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan dan Kelurahan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo terdiri atas 16 PNS, 7 PPPK dan 8 Staf non ASN. Terdiri dari 18 Pegawai Kecamatan dan 11 Pegawai Kelurahan.

Tabel 2.4.1
Data Pegawai ASN

No	Nama	Jabatan	Gol.	Pend	Intansi
1	Sri Isman Hartowo, S.STP.	Camat	IVa	S-1	Kecamatan

2	Yuli Rahayu, S.IP	Sekcam	IVa	S-1	Kecamatan
3	Harswati Prasetyo,S.KM.	Ka. Kesos	IIId	S-1	Kecamatan
4	Waskito Kusumo,S.Sos.	Ka. Ekbang	IIIc	S-1	Kecamatan
5	Mintarti,SE	Ka. Pemer	IIIc	S-1	Kecamatan
6	Sapto Rujito,S.Sos	Ka. Trantib	IIIb	S-1	Kecamatan
7	Slamet	Adm Kesos	IIIb	SLTA	Kecamatan
8	Rahmat sigit Pambudi,S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	IIIa	S1	Kecamatan
9	Beni Faizal	Adm Paten	IId	SLTA	Kecamatan
10	Haryadi	Adm Paten	IId	SLTA	Kecamatan
11	M. Chamidi	Adm Paten	IId	SLTA	Kecamatan
12	Sudarto,S.E	Lurah	IIIc	S-1	Kelurahan
13	Kurniawan Widyatmoko,S.Pd.	Seklur	IIIc	S-1	Kelurahan
14	Musbihan	Ka Pem Msy	IIIc	S-1	Kelurahan
15	Denan	Adm Sekret	IId	SLTA	Kelurahan
16	Gito	Administrasi	IId	SLTA	Kelurahan

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Wadaslintang

Tabel 2.4.2
Jumlah Pegawai PPPK

No	Nama	Jabatan	Gol.	Pend.	Instansi
1	Idi Pangastuti,A.Md.	Arsiparis	VII	D-3	Kecamatan
2	Kendar Suharyono,A.Md.	Pranata Komp	VII	D-3	Kecamatan
3	Mugiyah,S.I.Pust	Layanan OP	IX	S-1	Kecamatan
4	Surip Priyanti	Adm Pemer	V	SLTA	Kecamatan
5	Dwi Eko Suyono	Adm Trantib	V	SLTA	Kecamatan
6	Elis Sunarto	Adm Sekret	V	SLTA	Kelurahan
7	Solihun	Adm Pemb Masy	V	SLTA	Kelurahan

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Wadaslintang

Tabel 2.4.3
Data Pegawai Non ASN

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Wadaslintang

No	Nama	Jabatan	Pend.	Instansi
----	------	---------	-------	----------

1	Neneng Saputra, S.Kom.	Administrasi	S-1	Kecamatan
2	Lulut Dwi Suryani	Administrasi	S-1	Kecamatan
3	M. Irfan Hakim	Administrasi	SLTA	Kecamatan
4	Andriono	Administrasi	SLTP	Kecamatan
5	Kanti Rahayu	Administrasi	S-1	Kecamatan
6	Jefri Eko Saputro	Administrasi	SLTA	Kecamatan
7	An Naas Tasya Jelita Hati	Admin DTKS	S-1	Kelurahan
8	Naryo Al Khanif Abror	Kebersihan	SD	Kelurahan

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Wadaslintang

Dari Tabel 2.4.3 diatas diketahui bahwa Kecamatan Wadaslintang masih ada kekurangan personil, yaitu jabatan Kasi PATEN dan masih belum terisi.

2.4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Wadaslintang

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar ,maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi.Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Wadaslintang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Sarana dan Prasaran Kecamatan Wadaslintang

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik
2	Kendaraan Roda 2	11	Baik
3	Generating Set	1	Baik
4	Almari Besi	5	Baik
5	Rak Piring Besi	1	Baik
6	Rak Arsip	5	Baik
7	Filling Kabinet	2	Baik
8	Kursi Tamu	14	Baik
9	Pompa Air	1	Baik
10	Papan Pengumuman	1	Baik
11	Meja Kasir	1	Baik
12	Kursi tamu	14	Baik
13	Kursi Putar	3	Baik
14	Almari Kayu	2	Baik
15	Meja Pelayanan	2	Baik
16	Kursi Biasa	10	Baik
17	Meja Rapat	6	Baik
18	Meja kursi makan	2	Baik
19	Podium	1	Baik
20	Tempat tidur besi	1	Baik
21	Meja ketik	7	Baik
22	Almari Pakaian	1	Baik
23	Radio Cassete	1	Baik
24	Salon besar	2	Baik
25	Wireles	1	Baik
26	Miccure	2	Baik
27	Meja Kursi Kerja	4	Baik
28	Dipan kayu	2	Baik
29	Bangku tunggu	6	Baik
30	Pemadam	2	Baik

31	CCTV	2	Baik
32	Kursi Lipat	69	Baik
33	Televisi	5	Baik
34	Kitchen Set	1	Baik
35	Camera SLR	1	Baik
36	VCD Player	1	Baik
37	Buffet Kaca	2	Baik
38	CPU	6	Baik
39	Laptop	9	Baik
40	AC	2	Baik
41	Printer	5	Baik
42	Monitor LCD	3	Baik
43	Lampu LCD	1	Baik
44	Monitor	2	Baik
45	Komputer	4	Baik
46	LCD Proyektor	1	Baik
47	Bangunan Gd.Kantor luas 800 m ²	1	Baik
48	Bangunan Gd. Luas 24m ²	1	Baik
49	Bangunan Rumah Dinas luas 180 m ²	1	Baik
50	Bangunan garasi/parkiran 1, luas 244 m ²	1	Baik
51	Sabuk hijau, luas 24m ²	1	Baik

Sumber : Kecamatan Wadaslintang

Berdasarkan Tabel 2.4. di atas dengan jumlah Sarana Prasarana / Aset yang dimiliki Kecamatan Wadaslintang cukup memadai dalam menunjang kegiatan pemerintahan. Namun Kecamatan Wadaslintang sebagai tempat pelayanan

masyarakat umum masih memiliki kekurangan yaitu belum memiliki toilet untuk pengguna disabilitas dan ruang laktasi bagi ibu menyusui.

2.5 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Secara umum tugas utama dari Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo adalah memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wadaslintang dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum yang ingin membutuhkan pelayanan dari Kecamatan Wadaslintang. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo bisa dilihat dalam Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

[illegible]

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
1	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100 %	Sangat Tinggi	100	100	100	100	100
	PROGRAM PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
1	Presentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan , penganggaran, dan pelaporan tepat waktu	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100 %	Sangat Tinggi	100	100	100	100	100

Sumber: Gardu Perencanaan Kabupaten Wonosobo

Keterangan :
Sangat Tinggi : >=91-<=100
Tinggi : >=76-<=90
Sedang : >=66-<=75
Rendah : >=50-<=65
Sangat Rendah : <=50

2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wadaslintang maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Wadaslintang antara lain sebagai berikut:

2.6.1 Pemerintah Desa;

Pelayanan kecamatan kepada pemerintah desa meliputi pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan melakukan supervisi administrasi desa, membantu penyusunan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengevaluasi dan melaporkan kinerja pemerintahan desa kepada bupati.

2.6.2 Masyarakat;

Pelayanan kecamatan terhadap masyarakat meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi pemberdayaan masyarakat, pengelolaan ketenteraman dan ketertiban, serta pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan bupati/wali kota. Pelayanan ini mencakup pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, pembuatan surat-surat keterangan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Kecamatan juga berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan pemerintah di tingkat desa/kelurahan, serta pembina dan pengawas perangkat kelurahan.

2.6.3 Organisasi Perangkat Daerah

Pelayanan kecamatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada dasarnya adalah koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan perangkat daerah di wilayah kerjanya agar sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan bupati/wali kota untuk menjalankan fungsi kewilayahan, termasuk mengkoordinasikan instansi vertikal dan OPD dalam penegakan peraturan daerah, penataan ketenteraman umum, serta mengelola program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Wadaslintang juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi ulang oleh Tim Renstra Kecamatan ada beberapa permasalahan di Kecamatan, diantaranya :

- a. Masih rendahnya peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kecamatan
- b. Belum optimalnya fungsi tata kelola dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan
- c. Masih lemahnya mainstreaming/pengarusutamaan terkait dengan agrobisnis dan Pariwisata di tingkat kewilayahan
- d. Belum optimalnya koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan

Selain permasalahan di atas, di Kecamatan Wadaslintang terdapat permasalahan prioritas sebagai berikut :

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan

Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya pembangunan infrastruktur di wilayah OPD	Pembangunan infrastuktur belum optimal dan belum menyeluruh	- Kondisi geografis

Dari table 2.7 di atas yang menjadi permasalahan pokok

yaitu kerusakan infrastukrur jalan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- a. Kondisi geografis (struktur tanah tidak stabil) menyebabkan infrastruktur pembangunan jalan di Kecamatan Wadaslintang kurang optimal dan cepat rusak
- b. Faktor operasional seperti beban kendaraan bermuatan lebih juga menjadi penyebab kerusakan infrastuktur jalan
- c. Sistem drainase yang belum menyeluruh menyebabkan genangan air, menekan dan merusak lapisan jlان serta mempercepat proses kerusakan

2.8 Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Kecamatan Wadaslintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pelayanan umum (Publik) di identifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.8
Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis
Kecamatan Wadaslintang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			NASIONAL	PROVINSI	DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
Tata kelola dan pelayanan publik	Belum Optimalnya Tata kelola di Tingkat Kecamatan	Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, akuntabel dan Adaptif Belum Optimal	Isu Tata Kelola Pemerintahan : Pemerintahan yang lebih Efektif dan Akuntabel, Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tata Kelola Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Kelola Pemerintahan Dimanis dan Adaptif	Tata Kelola Pemerintah an Dinamis dan Adaptif
	Belum optimalnya Tata kelola di tingkat kecamatan					Optimalisas i fungsi tata kelola dan pelyanan publik di tingkat kewilayaha

						n
	Belum optimalnya peran Kecamatan dalam mendukung prioritas daerah					Peningkatan peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kewilayahan
						Optimalisasi koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan

Sumber : Ranhir RPJMD Kabupaten Wonosobo

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi RPJMD

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada periode RPJMD sebelumnya dan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sangat kompetitif maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

Visi : “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil Dan Makmur”

Tabel 3.1 Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial.
Adil	Kondisi Wonosobo yang merata dan seimbang. Pembangunan di Wonosobo melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya dan hasil pembangunannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Makmur	Kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan (lestari). Maju : kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, teknologi dan inovasi. Aman : kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha.

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Misi : "Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur" akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

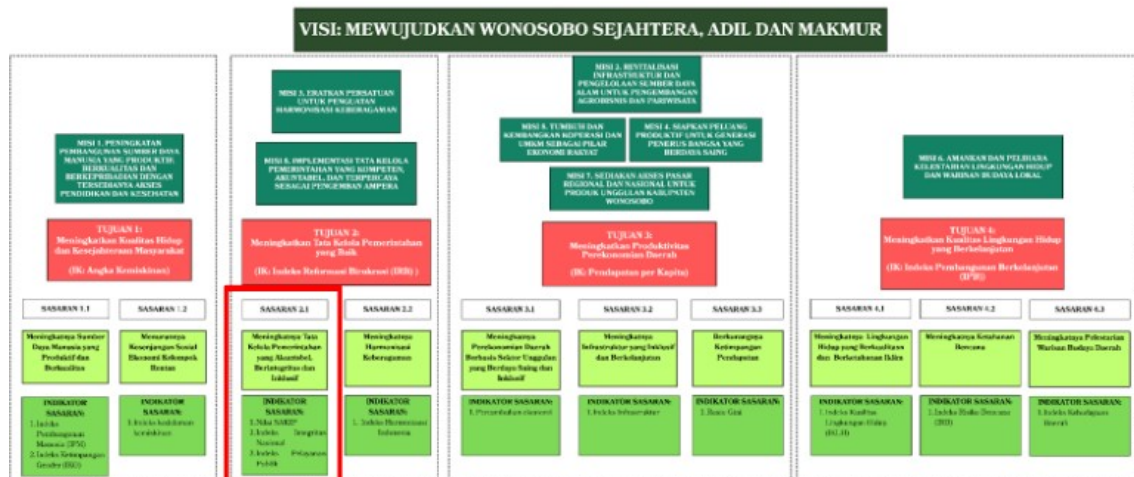
1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
5. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Selaras dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Wadaslintang masuk dalam misi ke delapan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo yaitu terkait dengan implementasikan tata Kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban ampera. Hal ini sangat menjadi esensi karena kecamatan merupakan unsur eksekutif yang berkaitan langsung dengan unsur kewilayahan yang menjadi ujung tombak dalam melayani Masyarakat dan menyelesaikan persoalan di Masyarakat. Kecamatan menjadi salah satu pendukung tujuan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu

Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi. Sasaran daerahnya adalah meningkatnya pelayanan public dengan indikator sasaran indeks pelayanan publik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Gambar 3.2
Tujuan dan sasaran RPJMD



Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan gambar tabel diatas, Kecamatan Wadaslintang memiliki tujuan meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Sasaran program yang akan dicapai yaitu meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inklusif, serta meningkatnya harmonisasi keberagaman. Sasaran program tersebut didukung oleh indikator sasaran program Nilai SAKIP, Indeks Integritas Nasional, dan Indeks Pelayanan Publik.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan dan Sasaran Renstra diambil dari Visi Kabupaten Wonosobo yaitu“ **Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur**” dan Misi ke 8 Kabupaten Wonosobo yaitu Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten, Akuntabel dan Terpercaya sebagai Pengemban Ampera(Amanat Penderitaan Rakyat).

Mengacu Tujuan dan sasaran Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Renstra

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Wadaslintang memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wadaslintang.

Adapun tujuannya yaitu : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan,yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rumusan Tujuan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2025–2029 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD);
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakeholder;
- d. Memiliki orientasi cita–cita kemasa depan;

2. Sasaran Renstra

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Wadaslintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sasaran ini akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu: *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Kelurahan*
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran ini akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu: *Nilai SAKIP*

Tabel 3.2

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK : SASARAN RPJMD WONOSOBO Meningkatnya Pelayanan Publik PP 17 2018 tentang Kecamatan pasal 10 terkait dengan Tugas Kecamatan 1. Mengkordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Mengkordinasi kan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3. Mengkordinasi kan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Mengkordinasi kan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayah an		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	N/A	90.00	92.84	93.64	94.45	95.26	96.06	
			Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	N/A	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik Kewilyayah an	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	N/A	90.00	92.84	93.64	94.45	95.26	96.06	
			Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	N/A	100	100	100	100	100	100	

5. Mengkoordinasi kan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 6. Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Wonosobo memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Wadaslintang untuk meningkatkan peran Kecamatan dalam fungsi kewilayahan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- b. Peningkatan Fungsi koordinasi kewilayahan
- c. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan
- d. peningkatan kualitas pelayanan publik
- e. peningkatan koordinasi dan pembinaan kelurahan dan desa untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan daerah

Tabel 3.2

Tahapan Strategi Renstra PD

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan

3.5 Arah Kebijakan Tahunan

Arah kebijakan tahun 2026-2030 difokuskan pada kebijakan penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

- a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik
- b. Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang berjalan
- c. Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang optimal
- d. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan
- e. Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah yang baik
- f. Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang optimal
- g. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa yang optimal

BAB IV

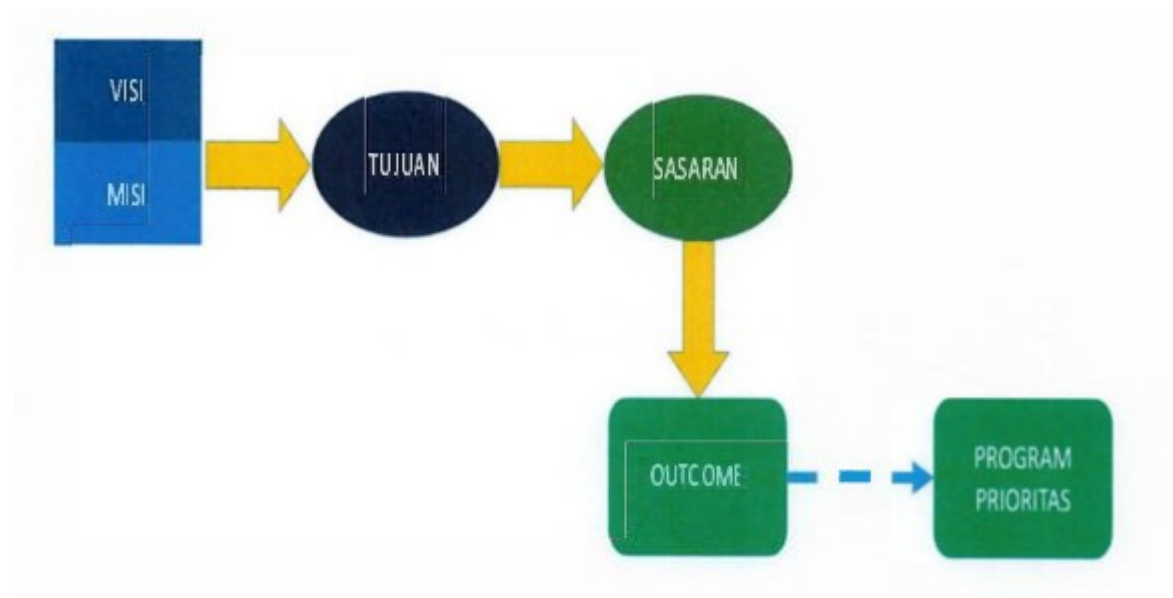
PRORAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Rencana Program

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Wadaslintang selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) adalah dalam rangka sinkronisasi program Kecamatan Wadaslintang dengan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo.

Gambar 4.1.1

Alur Perumusan Program RPJMD



Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilakukan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah

pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya.

Program, Kegiatan dan SubKegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategi Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo meliputi :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Persentase keselarasan Perencanaan Desa dan Kelurahan dengan prioritas Daerah.

1. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - a. Subkegiatan : Koordinasi dan sinergi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
2. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
 - a. Subkegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel), Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan Dana untuk Penanganan Permasalahan Daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan), dan Persentase Kelengkapan Data

Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan.

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - a. Subkegiatan : peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan desa
 - b. Kegiatan peningkatan efektivitas pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan.

 1. Kegiatan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - a. Subkegiatan : pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta menjaga keutuhan NKRI.
 - b. Subkegiatan : pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koordinasi kejadian kebencanaan dan Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan.

 1. Kegiatan koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- a. Subkegiatan : sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical lainnya diwilayah kecamatan.
2. Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - a. Subkegiatan : koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah terkait serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan peraturan perundang-undangan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Persentase Desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu, Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara, Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan dan Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu.

1. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa
 - a. Sub kegiatan: Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - b. Sub kegiatan: Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
 - c. Sub kegiatan: Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - d. Sub kegiatan: Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - e. Sub kegiatan: Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga

Tabel 4.1.2
Rencana Program Kecamatan Wadaslintang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.3. 1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Pelayanan Umum 3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum 7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	TPD.8.2.2.2 . Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahannya					
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	
					Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan	
	SPD.8.2.2.2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan					
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	
					Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan	
			OP.8.2.2.2.1.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
					Persentase	

					Keselarsan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	
						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				-Musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
						7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				-Koordinasi Monev Sarpras Umum (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) --> Bankeu Prov / Kab -Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelura han berbasis Reduce- Reuse- Recycle (3R)	Jumlah Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				- Layanan Administrasi Kependudukan (jemput bola) - Rakor Admin - Layanan Inklusif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			OP.8.2.2.2.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

					Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	
					Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	
					Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	
						7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun - Fasilitasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan - Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penanganan Disabilitas - Kampung KB - fasilitasi Festival anak soleh indonesia - fasilitasi lomba mtq - fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penanganan Kenakalan Remaja - Fasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

				Penanganan Pernikahan Anak - Fasilitasi Desa Siaga - pembinaan ODF - Pembinaan UKS - Pembinaan Perpustakaan - fasilitasi forum kesehatan desa - Pembinaan karang taruna		
						7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
				- Fasilitasi PKK Kecamatan - Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				- Fasilitasi Koperasi Merah Putih - Fasilitasi BUMDES - Fasilitasi Pameran UMKM	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			OP.8.2.2.2.1.4. Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	
					Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	
						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				1. Pembinaan Linmas (Pelatihan linmas,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

				pengiriman kontingen lomba satlinmas) 2. Patroli Wilayah dan pengamanan hari besar 3. Rapat dan Pelaporan Penegakan Perda 4. Pembinaan dan Pemberdayaan SAR/Relawan 5. Penanggulangan Bencana Kecamatan 6. Fasilitasi FKDM	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			OP.8.2.2.2.1.3. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan	
						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				- Sosialisasi Bahaya NAPZA dan Penyakit Masyarakat - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan HUT RI (termasuk Paskib) - Fasilitasi FKUB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (rakor 4 kali setahun)	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

					terfasilitasi	
			OP.8.2.2.2.1.5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Persentase Desa yang menetapka n APBDes Tepat Waktu	
					Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	
					Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	
					Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	
					Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksana kan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangana n Kemiskinan Tepat Waktu	
						7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				-Rakor Pemerintah an desa penyusunan Produk hukum desa -Pembinaan pemerintah an desa (Kades dan BPD) dan lembaga kemasyarak atan desa (LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu) -Fasilitasi pengangkat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

				an dan pemberhentian perangkat desa -PBB		
				- Fasilitasi penyusunan APBDes - Pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Monev Pilkades, Rapat2, Sosialisasi dll	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				-Monitoring musrenbangdes -Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Rakor Kemiskinan, Fasilitasi TKPK, Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Kerjasama Antar Desa (BUMDesma , BKAD) Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

KELURAHAN

						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
						7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Musrenbang Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

				Fasilitasi dan vervaldasi Anak Tidak Sekolah		
						7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Musrenbang Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarpras Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Fasilitasi FKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Fasilitasi Kegiatan K3 di Kelurahan		
				Fasilitasi Kepemudaan		
				Fasilitasi PAUD		
				Fasilitasi Posyandu Lansia		
				Fasilitasi TK		
				Jasa Kader Pembangun Manusia		
				Jasa Kader Posyandu		
				Jasa RT dan RW		
				Jasa Tenaga Linmas		
				Jasa Tenaga Pembantu Kelurahan		
				Kegiatan Posyandu		
				Pembinaan RT dan RW		
				Perjalanan Dinas		
				PMT Posyandu Balita		
				Rapat Koordinasi RT dan RW		
						7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
				Fasilitasi Kegiatan PKK Fasilitasi Penurunan Stunting	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dlaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pelatihan Linmas FKDM Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Fasilitasi FKUB	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

				Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Kelurahan	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
--	--	--	--	---	---	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Tabel 4.1.3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Wadaslintang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGG UNGJAWA B (KASI/KAS UBAG)	BAS ELI NE 202 4	Sat uan	TARGET DAN PAGU TAHUN											
									PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
									2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGA RAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK									105.000. 000		110.000, 000		112.000. 000		112.000. 000		120.000. 000		116.000. 000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, diukur melalui survei berdasarkan berbagai aspek pelayanan terutama Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Hasil Survei	Hasil Survei		91,8 5	%		92,03		92,84		93,64		94,45		95,26		96,06
	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah		Keselarasan usulan musyawarah desa dan kelurahan dengan prioritas daerah di RKPd	Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan Prioritas dibanding dengan Prioritas Daerah dikali 100%	Pembilang = Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan Prioritas Penyebut = Prioritas Daerah		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									28.000.0 00		30.000.0 00		31.500.0 00		31.500.0 00		35.000.0 00		32.500.0 00	
7.01.02.2.01.00 01 Koordinasi/ Sine rgi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Si nergi	-Musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang	Total Laporan Koordinasi/ Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi /Siner gi	Jumlah Laporan Koordinasi/ Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan	EKBANG		Ang ka	14.000.0 00	4	15.000.0 00	4	15.500.0 00	4	15.500.0 00	4	17.000.0 00	4	16.500.0 00	4

dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
7.01.02.2.01.00 01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi TKPK Kecamatan (rakor, pengelolaan dan pelaporan program Nangkis) --> khusus 2026						14.000.000	4	15.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	18.000.000	4	16.000.000	4	
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								14.000.000		15.000.000		15.500.000		15.500.000		17.000.000		16.500.000		
7.01.02.2.03.00 01 Koordinasi/ Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/ Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-Koordinasi Money Sarpras Umum (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) --> Bankeu Prov / Kab -Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurah an berbasis Reduce-Recycle (3R)	Total Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	EKBANG	Ang ka	14.000.000	6	15.000.000	6	15.500.000	6	15.500.000	6	17.000.000	6	16.500.000	6	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								63.500.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		68.000.000		67.000.000		
7.01.02.2.04.00 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Layanan Administrasi Kependudukaka n (jemput bola) - Rakor Admin - Layanan Inklusif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenganan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PATEN	Ang ka	63.500.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	68.000.000	4	67.000.000	4	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT								155.000.000		159.829.440		161.625.840		162.190.080		173.553.840		167.357.040		

DESA DAN KELURAHAN																				
	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan		Tingkat partisipasi perempuan dan masyarakat rentan yang hadir dan terlibat aktif di musyawarah desa / musyawarah kelurahan. Kelompok Rentan : Lansia, Disabilitas, Kelompok Minoritas	Jumlah Perempuan dan Kelompok Rentan yang hadir dan terlibat di Musdes/M uskel dibanding Jumlah Peserta Musdes/M uskel dikali 100%	Pembilang = Jumlah Perempuan dan Kelompok Rentan yang hadir dan terlibat di Musdes/Muskel Penyebut = Seluruh Peserta Musdes/Muskel		N/A	%		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)		Jumlah Total Permasalahan Daerah yang anggarannya dialokasikan oleh desa dan kelurahan dibagi jumlah Total Permasalahan Daerah yang ada di Desa atau Kelurahan. Permasalahan Daerah yang dimaksud 1. Kemiskinan, 2. Pendidikan, 3. Stunting, 4. Kelompok Rentan.	Jumlah Total Permasalahan Daerah yang dialokasikan dana oleh desa dan kelurahan dibagi jumlah Total Permasalahan Daerah yang ada di Desa dan Kelurahan (Catatan : Jika ada salah satu atau keseluruhan permasalahan ada di desa/kelurahan sudah tuntas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah dialokasikan)	Pembilang = Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan) Penyebutnya = dibagi jumlah desa dan kelurahan		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan		Pelaporan Intervensi Stunting di Aplikasi Pelaporan Stunting Kemendagri	sesuai Indikator di Aplikasi	sesuai Indikator di Aplikasi		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan									68.000.000		70.000.000		71.500.000		71.750.000		77.500.000		75.000.000	

Pemberdayaan Desa																					
7.01.03.2.01.00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun - Fasilitasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan - Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penanganan Disabilitas - Kampung KB - fasilitasi Festival anak soleh indonesia - fasilitasi lomba mtq - fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penanganan - Kenakalan Remaja - Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak - Fasilitasi Desa Siaga - pembinaan ODF - Pembinaan UKS - Pembinaan Perpustakaan - fasilitasi forum keschatan desa - Pembinaan karang taruna	Total Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KESOS				68.000.000	4	70.000.000	4	71.500.000	4	71.750.000	4	77.500.000	4	75.000.000	4
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									87.000.000		89.000.000		90.125.840		90.440.080		96.053.840		92.357.040		
7.01.03.2.03.00 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	- Fasilitasi PKK Kecamatan - Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, movev)	Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	KESOS			30.000.000	2	30.000.000	2	30.125.840	2	30.440.080	2	33.053.840	2	30.357.000	2	
7.01.03.2.03.00	Jumlah	- Fasilitasi	Banyaknya	Jumlah	Jumlah Usaha	EKBANG			20.000.0	2	21.000.0	2	22.000.0	2	22.000.0	2	23.000.0	2	22.000.0	2	

04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Koperasi Merah Putih - Fasilitas BUMDES - Fasilitas Pameran UMKM	Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi				00		00		00		00		00		00	
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																				
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	- Fasilitas PKK Kecamatan							37.000.000	200	38.000.000	200	38.000.000	200	38.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									70.000.000		69.621.000		70.403.250		70.649.250		75.599.250		72.900.000	
	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan		Koordinasi kejadian kebencanaan yang dilaporkan maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku	koordinasi kejadian kebencanaan dibanding jumlah semua kejadian bencana dikali 100%	Pembilang = koordinasi kejadian kebencanaan Penyebut = jumlah semua kejadian bencana		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan		Pelanggaran Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaporkan	Pelanggaran Perda Trantibhum yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan ke Satpol dibanding dengan Pelanggaran Perda Trantibhum yang terdata di kecamatan dikali 100%	Pembilang = Pelanggaran Perda Trantibhum yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan ke Satpol Penyebut = Pelanggaran Perda Trantibhum yang terdata di kecamatan		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									70.000.0 00		69.621.0 00		70.403.2 50		70.649.2 50		75.599.2 50		72.900.0 00	
7.01.04.2.01.00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Pembinaan Linmas (Pelatihan linmas, pengiriman kontingen lomba satlinmas) 2. Patroli Wilayah dan pengamanan hari besar 3. Rapat dan Pelaporan Pencegakan Perda 4. Pembinaan dan Pemberdayaa n SAR/Relawan 5. Penanggulang an Bencana Kecamatan 6. Fasilitasi FKDM	Total Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	TRANTIB			70.000.0 00	2	50.621.0 00	2	70.403.2 50	2	70.649.2 50	2	75.599.2 50	2	72.900.0 00	2
7.01.04.2.01.00 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Fasilitasi FKUB --> Khusus 2026							-	-	19.000.0 00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAH N UMUM									125.000. 000		141.930. 000		143.590. 000		144.420. 000		153.550. 000		148.570. 000	
	Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan		Perbandingan upaya pencegah konflik SARA yang dilakukan oleh Kecamatan dengan target pencegahan konflik SARA dalam satu tahun	Jumlah pelaksanaa n pencegaha n konflik SARA dibagi target pencegaha n konflik SARA	Pembilang = Jumlah pelaksanaan pencegahan konflik dibagi target pencegahan konflik SARA		100, 00	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									125.000. 000		141.930. 000		143.590. 000		144.420. 000		153.550. 000		148.570. 000	
7.01.05.2.01.00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Sosialisasi Bahaya NAPZA dan Penyakit Masyarakat - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Banyaknya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	TRANTIB		Ang ka	60.000.0 00	3	40.000.0 00	3	43.590.0 00	3	44.420.0 00	3	53.550.0 00	3	48.570.0 00	3
7.01.05.2.01.00 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan HUT RI (termasuk Paskib) --> Khusus 2026							-	-	41.930.0 00	3	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.05.2.01.00 08 Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (rakor 4 kali setahun)	Banyaknya forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	TRANTIB		Ang ka	65.000.0 00	2	60.000.0 00	2	100.000. 000	3	100.000. 000	3	100.000. 000	3	100.000. 00	3

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									95.000.000		78.000.000		79.000.000		79.000.000		85.000.000		82.000.000	
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		Desa di wilayah kecamatan yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Peraturan Desa (Perdes) pada waktu yang telah ditetapkan	Jumlah Desa yang menetapkan n APBDes tepat waktu dibanding jumlah seluruh desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang mengirimkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu Penyebut = Seluruh Desa		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu		Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes tahunan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes sesuai batas waktu dibanding jumlah seluruh desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes sesuai batas waktu dibanding Penyebut = Seluruh Desa		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara		Informasi berupa perencanaan dan anggaran desa secara digital maupun non digital (APBDes, RPJMDes)	Jumlah Desa yang mempublikasikan dokumen APBDes dan RPJMDes secara digital dan non digital dibanding jumlah desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang mempublikasikan dokumen APBDes dan RPJMDes secara digital dan non digital Penyebut = seluruh desa		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan		Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan di Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat	sesuai Indikator di Aplikasi	sesuai Indikator di Aplikasi		N/A	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi		Data Terpadu penanganan kemiskinan yang ditetapkan dan diwajibkan kepada desa/kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang melakukan verval dibanding	Pembilang = Jumlah Desa / Kelurahan yang melakukan verval Penyebut = jumlah desa / kelurahan		N/A	%		50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00

	Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu			dengan jumlah desa dikali 100%																
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								95.000.0 00		78.000.0 00		79.000.0 00		79.000.0 00		85.000.0 00		82.000.0 00		
7.01.06.2.01.00 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-Rakor Pemerintahan desa penyusunan Produk hukum desa -Pembinaan pemerintahan desa (Kades dan BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu) -Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa -PBB	Banyaknya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administra si Tata Pemerinta han Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PEMERINTAHAN		Ang ka	38.000.0 00	16	33.000.0 00	16	35.250.0 00	16	35.250.0 00	16	37.000.0 00	16	35.000.0 00	16
7.01.06.2.01.00 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Fasilitasi penyusunan APBDDes - Pembinaan penatausahaa n keuangan dan tatakelola aset desa	Banyaknya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PEMERINTAHAN		Ang ka	5.000.00 0	16	7.000.00 0	16	7.000.00 0	16	7.000.00 0	16	8.000.00 0	16	7.500.00 0	16
7.01.06.2.01.00 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Monev Pilkades, Rapat2, Sosialisasi dll	Banyaknya dokumen kegiatan fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa n Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	PEMERINTAHAN		Ang ka			10.000.0 00	16								
7.01.06.2.01.00 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-Monitoring musrenbangdes -Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	Banyaknya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencana an Pembangu nan Daerah dengan Pembangu nan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PEMERINTAHAN		Ang ka	24.000.0 00	16	15.000.0 00	16	19.250.0 00	16	19.250.0 00	16	21.000.0 00	16	21.500.0 00	17
7.01.06.2.01.00 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Rakor Kemiskinan, Fasilitasi TKPK,	Banyaknya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	KESOS		Ang ka	4.000.00 0	16	7.000.00 0	16	7.250.00 0	16	7.250.00 0	16	8.000.00 0	16	7.500.00 0	17

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan	dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
7.01.06.2.01.00 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	Kerjasama Antar Desa (BUMDesma, BKAD) Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	Banyaknya dokumen kerjasama Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	PEMERINTAHAN	dokumen	Angka	14.000.000	16	6.000.000	16	10.250.000	16	10.250.000	16	11.000.000	161	10.500.000	17
RUTIN																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik		Proporsi aset tetap yang dimiliki oleh sebuah Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam kondisi fungsional dan terawat sesuai standar					100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		ukuran tingkat ketersediaan dan penyelesaian layanan dukungan administrasi yang esensial untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah					100,00	%	276.099.999	100,00	371.760.000	100,00	375.920.000	100,00	377.200.000	100,00	403.680.000	100,00	389.280.000
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah		Nilai (skor) yang diperoleh dari hasil evaluasi atas keterbukaan informasi publik					87,67	%		88,20		88,50		88,70		89,00		89,20	89,50
	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral		mengukur kelengkapan data statistik yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Daftar Data Kabupaten					N/A	%	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		mengukur tingkat kepatuhan dan					N/A	%		55,58		65,53		68,07		69,87		71,73	73,60

			kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan kaidah, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku																	
	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		Konsistensi antara program yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja (Renja) PD dengan program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD			100,00	%	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00	100,00	100.00
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu		perbandingan dokumen perencanaan dan evaluasi yang ditetapkan tepat waktu					7.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		10.000.000		9.000.000		
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		SEKRETAR IAT		Angka	3.500.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	4.500.000	2	
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SEKRETAR IAT		Angka	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	4.500.000	1	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi serapan Anggaran Perangkat Daerah		Perbandingan antara jumlah total anggaran yang direalisasi dengan jumlah total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran					Rp 3,059,399,649		Rp 3,359,399,649		Rp 3,659,399,649		Rp 3,959,399,649		Rp 4,259,399,649		Rp 4.559.399.649		
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		SEKRETAR IAT		Angka	Rp 3,059,399,649	23	Rp 3,359,399,649	23	Rp 3,659,399,649	23	Rp 3,959,399,649	23	Rp 4,259,399,649	23	Rp 4.559.399.649	23	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								39.099.999		61.000.000		61.500.000		61.700.000		70.000.000		67.000.000		
X.XX.01.2.06.00	Jumlah Paket	penyediaan	Jumlah Paket		SEKRETAR		Ang	2.099.99	1	5.000.00	1	5.000.00	1	5.000.00	1	6.000.00	1	5.500.00	1	

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	komponen listrik	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			IAT		ka	9		0		0		0		0		0	
X.XX.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta printer	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Angka	5.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
X.XX.01.2.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	isi ulang tabung gas (5 atau 12 Kg) perkakas rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Angka	2.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	4.500.000	1
X.XX.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Angka	4.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1
X.XX.01.2.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	langganan koran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Angka	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	1.500.000	1
X.XX.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas makan minum Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			SEKRETAR IAT		Angka	25.000.000	12	35.000.000	12	35.500.000	12	35.700.000	12	40.000.000	12	38.500.000	12
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									65.000.000		93.000.000		94.000.000		94.300.000		97.380.000		95.000.000	
X.XX.01.2.07.00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN, CCTV, Kamera, Drone, Handphone, LCD Projector)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Angka	15.000.000	1	25.000.000	1	25.500.000	1	25.600.000	1	27.000.000	1	26.000.000	1
X.XX.01.2.07.00 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			SEKRETAR IAT		Angka	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	11

Lainnya	Lainnya yang Disediakan	lainnya	Disediakan																	
X.XX.01.2.07.00 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Ang ka	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
X.XX.01.2.07.00 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Ang ka	30.000.000	1	48.000.000	1	48.500.000	1	48.700.000	1	50.380.000	1	49.000.000	1
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									113.000.000		138.000.000		139.500.000		140.100.000		148.000.000		144.280.000	
X.XX.01.2.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			SEKRETAR IAT		Ang ka	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4
X.XX.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belanja langganan Listrik, Air dan Internet (termasuk sewa aplikasi canva, drive dll)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Ang ka	16.000.000	4	23.000.000	4	23.500.000	4	23.600.000	4	25.800.000	4	24.280.000	4
X.XX.01.2.08.00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Ang ka	5.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	4	9.000.000	4
X.XX.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	belanja jasa pelaksana transaksi keuangan, honor non ASN, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			SEKRETAR IAT		Ang ka	94.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.500.000	12	110.000.000	12	109.000.000	12

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									52.000.0 00		71.760.0 00		72.920.0 00		73.100.0 00		78.500.0 00		74.000.0 00	
X.XX.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		SEKRETAR IAT	13	Ang ka	30.000.0 00	13	40.760.0 00	13	40.420.0 00	13	40.500.0 00	13	40.000.0 00	13	40.000.0 00	13	
X.XX.01.2.09.00 05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		SEKRETAR IAT		Ang ka	2.000.00 0	6	3.000.00 0	6	3.000.00 0	6	3.000.00 0	6	3.000.00 0	6	4.000.00 0	6	
X.XX.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		SEKRETAR IAT		Ang ka	4.000.00 0	10	7.000.00 0	10	7.000.00 0	10	7.000.00 0	10	8.000.00 0	10	7.000.00 0	10	
X.XX.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		SEKRETAR IAT		Ang ka	8.000.00 0	2	15.000.0 00	2	15.500.0 00	2	15.600.0 00	2	17.500.0 00	2	16.000.0 00	2	
X.XX.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		SEKRETAR IAT		Ang ka	5.000.00 0	1	4.000.00 0	1	4.000.00 0	1	4.000.00 0	1	6.000.00 0	1	4.000.00 0	1	
X.XX.01.2.09.00 11 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		SEKRETAR IAT		Ang ka	3.000.00 0	1	2.000.00 0	1	3.000.00 0	1	3.000.00 0	1	4.000.00 0	1	3.000.00 0	1	
KELURAHAN																				
PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT								482,314, 750		506,126, 560		511,815, 160		513,601, 920		549,587, 160		529,963, 960		

DESA DAN KELURAHAN																			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								10.00.00 0		10.00.00 0		10.00.00 0		10.00.00 0		10.00.00 0		10.00.00 0	
7.01.03.2.01.00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penangulangan Kemiskinan	Banyaknya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Angka	8.00.000	1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	1
		Fasilitasi dan vervaldasi Anak Tidak Sekolah						2.000.00 0	1	2.000.00 0	1	2.000.00 0	1	2.000.00 0	1	1	2.000.00 0	2.000.00 0	1
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								427.000. 000		445.000. 000		450.000. 000		451.500. 000		468.000. 000		461.000. 000	
7.01.03.2.02.00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan	Total Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Angka	8.000.00 0	2	15.000.0 00	2	15.000.0 00	2	15.500.0 00	2	18.000.0 00	2	16.000.0 00	2
7.01.03.2.02.00 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarpras Kelurahan	Total Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Angka	9.000.00 0	5	10.000.0 00	5	10.000.0 00	5	15.000.0 00	5	20.000.0 00	5	15.000.0 00	5
7.01.03.2.02.00 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi FKK	Banyaknya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Angka	400.000. 000	2	410.000. 000	2	415.000. 000	2	416.000. 000	2	420.000. 000	2	420.000. 000	2
		Fasilitasi Kegiatan K3 di Kelurahan																	
		Fasilitasi Kepemudaan																	
		Fasilitasi PAUD																	
		Fasilitasi Posyandu Lansia																	
		Fasilitasi TK																	
		Jasa Kader Pembangun Manusia																	
		Jasa Kader Posyandu																	

		Jasa RT dan RW																		
		Jasa Tenaga Linmas																		
		Jasa Tenaga Pembantu Kelurahan																		
		Kegiatan Posyandu																		
		Pembinaan RT dan RW																		
		Perjalanan Dinas																		
		PMT Posyandu Balita																		
		Rapat Koordinasi RT dan RW																		
7.01.03.2.06								55.314.750		61.126.560		61.815.160		62.101.920		81.587.160		68.963.960		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																				
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Fasilitasi Kegiatan PKK Fasilitasi Penurunan Stunting	Banyaknya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Angka	55.314.750	2	61.126.560	2	61.815.160	2	62.101.920	2	81.587.160	2	68.963.960	2	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								22.770.000		23.207.000		23.467.750		23.549.750		25.199.750		24.300.000		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								22.770.000		23.207.000		23.467.750		23.549.750		25.199.750		24.300.000		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Linmas FKDM Kelurahan				Seksi Pemerintahan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Angka	17.770.000	2	18.207.000	2	18.467.750	2	18.549.750	2	20.199.750	2	19.300.000	2	
Harmonisasi	Jumlah	Fasilitasi				Seksi	Ang	5.000.00	2	5.000.00	2	5.000.00	2	5.000.00	2	5.000.00	2	5.000.00	2	

Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	FKUB				Pemerintahan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		ka	0		0		0		0		0		0	
PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									25.000.000		29.070.000		29410.000		29.580.000		31.450.000		30.430.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									25.000.000		29.070.000		29410.000		29.580.000		31.450.000		30.430.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Kelurahan				Seksi Pemerintahan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Angka	25.000.000	1	29.070.000	1	29410.000	1	29.580.000	1	31.450.000	1	30.430.000	1

4.2 Program Kegiatan Prioritas

Daftar program prioritas Kecamatan Wadaslintang berdasarkan program taktis RPJMD 2026-2029 Kabupaten Wonosobo.

Tabel 4.2.1
Daftar Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

N o	Program Prioritas	Outcome	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Output	Penanggung jawab
1	Fasilitasi dan Koordinasi Koperasi Merah Putih	Meningkat nya Pemberday aan Masyaraka t Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	7.01.03.2.0 3.0004 Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Koperasi Merah Putih Fasilitasi MBG	Ekbang
2	Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Terintegrasi	Meningkat nya Pemberday aan Masyaraka t Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.0 3 Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.0 3.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarak atan	Fasilitasi Penangana n Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev)	Kesos
		Meningkat nya Pembinaan dan Pengawasa n Pemerinta han Desa	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	7.01.06.2.0 1.0009 Fasilitasi Sinkronisas i Perencanaa n Pembangun an Daerah dengan Pembangun an Desa	7.01.06.2.0 1.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdaya an Masyarakat Desa	Rakor Kemiskina n, Fasilitasi TKPK, Monitoring dan Evaluasi penangana n kemiskina n	Kesos
3	Koordinasi Program Pembelajaran Daring Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) Usia 25-30 Tahun	Meningkat nya Pemberday aan Masyaraka t Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	7.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun	Kesos
4	Pemenuhan Layanan Publik Yang Inklusif	Meningkat nya Kualitas Penyelengg	7.01.02 PROGRAM PENYELENGG ARAAN	7.01.02.2.0 4 Pelaksanaa n Urusan	7.01.02.2.0 4.0003 Pelaksanaan Urusan	Layanan Administra si Kependud	Paten

		araan Pemerintah dan Pelayanan Publik	PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah an yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	ukan (jemput bola)	
5	Implementasi Prinsip Kabupaten Wonosobo Ramah HAM pada pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan	Meningkat nya Pemberday aan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	7.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun - Fasilitasi penangana n masalah sosial kemasyara katan - Fasilitasi Lomba Pemberday aan Masyaraka t - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penangana n Disabilitas - Kampung KB - fasilitasi Festival anak soleh indonesia - fasilitasi lomba mtq - fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penangana n - Kenakalan Remaja - Fasilitasi Penangana n Pernikaha n Anak - Fasilitasi Desa Siaga -	Kesos

						pembinaa n ODF - Pembinaa n UKS - Pembinaa n Perpustak aan - fasilitasi forum kesehatan desa - Pembinaa n karang taruna - Fasilitasi dan koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) - Fasilitasi dan koordinasi Koperasi Merah Putih	
		Meningkat nya Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum	7.01.05 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	7.01.05.2.0 1 Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.0 1.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka	- Sosialisasi Bahaya NAPZA dan Penyakit Masyaraka t - Sosialisasi Wawasan Kebangsaa n - Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan - HUT RI (termasuk Paskib) - Fasilitasi FKUB	Trantib

					Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
6	Koordinasi Satu Data Wonosobo di tingkat kewilayahan	Meningkat nya Kualitas Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitasi penunjang satu data (Internet dll)	Sekretariat
7	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse- Recycle (3R)	Meningkat nya Kualitas Penyelengg araan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	7.01.02 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.0 3 Koordinasi Pemeliharaa an Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.0 3.0001 Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaa an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pengelolaa n Sampah di tingkat Desa/Kelu rahan berbasis Reduce- Reuse- Recycle (3R)	Ekbang
		Meningkat nya Pembinaan dan Pengawasa n Pemerinta han Desa	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	7.01.06.2.0 1 Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	7.01.06.2.0 1.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	fasilitasi penyusuna n APBDes, pembinaa n penatausa haan keuangan dan tatakelola aset desa	Pemerintah an

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

Selain program prioritas Kecamatan Wadaslintang sesuai program RPJMD 2026-2029 Kabupaten Wonosobo, terdapat juga program prioritas Nasional, yaitu Fasilitasi dan koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Fasilitasi dan koordinasi Koperasi Merah Putih.

Kecamatan sebagai unit pelaksana pembangunan memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pemenuhan gizi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu program strategis dalam mendukung upaya penurunan angka stunting, peningkatan ketahanan pangan keluarga, dan penguatan generasi muda di wilayah kecamatan. Program ini juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah kecamatan, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kebiasaan hidup sehat dan konsumsi pangan bergizi seimbang.

Koperasi merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Melalui program “Koperasi Merah Putih”, kecamatan berkomitmen membangun ekosistem ekonomi rakyat yang kuat, inklusif, dan berdaya saing.

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan indikator ini berlandaskan pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta sasaran RPJMD yang relevan, sehingga pelaksanaannya selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Bagi perangkat daerah, tujuan yang ingin dicapai mencakup koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan serta penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, hingga pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Indikator kinerja yang digunakan antara lain persentase pelimpahan kewenangan daerah di kecamatan yang dapat dilaksanakan secara optimal serta indeks kepuasan masyarakat kecamatan. Kedua indikator ini diukur secara kuantitatif dalam bentuk persentase maupun angka indeks, dengan target yang meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030.

Tabel 4.3.1
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama		CAPAIAN	TARGET	

	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	%	N/A	100.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	N/A	90.00	92.84	93.64	94.45	95.26	96.06	
Nilai SAKIP	Angka	71,18	61,80	65	68	70	73	75	
Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Angka	32	34.00	37	40	43	45	47	

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan sebagai ukuran utama untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator ini mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, hingga keselarasan perencanaan desa dan daerah.

Melalui capaian dan target yang ditetapkan secara tahunan, IKK diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja yang terukur, transparan, serta menjadi dasar evaluasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Berikut adalah table Indikator Kinerja Kunci :

Tabel 4.3.2
Indikator Kinerja Kunci

No	IndikatorKinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/Program Nomenklatur)	CAPAIAN	TARGET WADASLINTANG					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	N/A	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
2	Persentase asset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keterisian data statistik sektoral	N/A	100	100	100	100	100	100
5	Nilai hasil pengawasan kearsipan	N/A	75,39	80,00	83,00	85,00	85,00	87,00
6	Persentase keselarasan program perangkatdaerah dengan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	93,04	93,29	93,54	93,89	94,29	94,69	95,24
8	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	N/A	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan IntervensiStunting sesuaiatawaktuyang ditentukan	N/A	100	100	100	100	100	100

10	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	N/A	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
12	Persentase Perempuan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	N/A	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	N/A	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Keterwakilan Unsur Agama dan Kepercayaan Dalam Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	N/A	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Monitoring Evaluasi Antisipasi Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	N/A	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	N/A	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	N/A	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	N/A	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Kesesuaian Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes	N/A	100	100	100	100	100	100
22	Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah	N/A	100	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen kami dalam menjabarkan visi dan misi pembangunan tingkat kabupaten ke dalam skala wilayah yang lebih operasional. Dokumen ini menjadi pedoman strategis yang mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah, seperti pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penataan wilayah.

Secara substansial, Renstra ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai target-target kinerja yang terukur. Perencanaan yang matang ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, mengefisienkan alokasi anggaran, dan memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bukan hanya diukur dari realisasi program semata, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Sinergi dan Koordinasi: Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, maupun lintas sektor di tingkat kabupaten.
2. Akuntabilitas dan Transparansi: Seluruh proses pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi anggaran maupun capaian kinerja. Informasi mengenai progres pembangunan harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

3. Profesionalisme Aparatur: Seluruh aparaturnya di lingkungan Kecamatan Wadaslintang wajib memiliki integritas, semangat, dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat.

Untuk memastikan Renstra ini berjalan sesuai rencana, mekanisme pengendalian dan evaluasi akan dilakukan secara periodik dan berjenjang.

1. Pengendalian Internal: Pengawasan dan monitoring akan dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

2. Evaluasi Akhir Periode: Pada akhir masa berlaku Renstra, akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan berharga untuk penyusunan Renstra periode berikutnya.

Dengan adanya komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak, serta melalui mekanisme pelaksanaan dan evaluasi yang ketat, kami optimis Renstra ini akan menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan

Wadaslintang, November 2025
**Camat Wadaslintang Kabupaten
Wonosobo**



Sri Isman Hartowo, S.STP.
Pembina
NIP 198412132003121002